BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan peneliti pada bab sebelumnya mengenai Implementasi Kebijakan tentang Sistem Informasi Manajemen Solusi Layanan terpadu Nusantara (Simsolatera) dalam meningkatkan pelayanan publik mengenai penerbitan akta catatan sipil yang dilaksanakan pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung. Maka peneliti membuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

1. Proses komunikasi yang berlangsung dalam Implementasi Kebijakan tentang Simsolatera kurang berjalan dengan baik. Penyampaian informasi hanya dipahami oleh aparatur saja. Sedangkan masyarakat selaku sasaran dari kebijakan tersebut banyak yang tidak mengetahui secara jelas informasi yang disampaikan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung menyangkut penerbitan akta kelahiran.
2. Sumber daya yang ada dalam implementasi kebijakan Simsolatera apabila dilihat dari dimensi sumber daya manusia, kompetensi pelaksana kebijakan dalam mengoperasionalkan komputer sudah baik. Kompetensi tersebut dikarenakan *background* pendidikan operator pada khususnya berasal dari ilmu komputer. Akan tetapi sumber daya anggaran yang diperlukan menyangkut keperluan perlengkapan peralaatan dalam pengelolaan maupun *upgrde hardware* bisa dikatakan kurang. Letak geografis Kabupaten Bandung

yang luas dan program Simsolatera yang masih *offline* masih menjadi hambatan dalam mengoptimalkan informasi yang akan diberikan kepada masyrakat. Wewenang yang diterima oleh pelaksana kebijakanpun dalam Implementasi Kebijakan Simsolatera telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Disposisi pelaksana implementasi kebijakan Simsolatera sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pengangakatan operator berdasarkan hasil *testing* CPNS yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung. Hasil tersebut sesuai dengan pengajuan Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung yang mengajukan penambahan jumlah pegawai yang mempunyai *background* pendidikan ilmu komputer.
4. Struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Simsolatera yang dilaksanakan pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung sesuai dengan SOP yang ditetapkan. SOP yang dijadikan pedoman oleh aparatur dijalankan sesuai dengan kewenanganya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah peneliti kemukakan, maka peneliti mengemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung. Saran-saran tersebut antara lain :

1. Proses komunikasi yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung harus diperluas lagi penyampaiannya.

Untuk kedepannya perlu mensosialisasikan implementasi mengenai simsolatera kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui tujuan yang diinginkan. Mudah-mudahan dengan disampaikannya Simsolatera kepada masyarakat tingkat ketidakpedulian masyarakat akan pentingnya akta catatan sipil dapat diminimalisir bahkan terselsaikan.

2. Sumber daya yang ada di pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung harus menjadi perhatian. Walaupun secara kompetensi SDM yang ada mampu mengerjakan tugasnya dengan baik, akan tetapi berkaitan dengan terbatasnya jumlah operator program mengakibatkan terjadinya penumpukan data sehingga proses pelayanan kepada masyarakat agak terhambat. Fasilitas yang adapun sudah banyak yang harus diperbaharui sehingga kenyamanan bagi aparatur dalam bekerja dan masyarakat yang sedang menunggu penerbitan akta catatan sipil dapat lebih baik lagi
3. Pengangkatan pegawai yang akan dijadikan operator program melalui mekanisme rekruitmen pegawai melalui berdasarkan *testing* CPNS harus tetap dijalankan. Mekanisme tersebut terbukti mempunyai peranan dalam menentukan profesionalisme aparatur.
4. Harmonisasi serta koordinasi antara aparatur harus lebih ditingkatkan, karena kedua hal tersebut sangat rentan terhadap terpecah-pecahnya organisasi. Apabila hal ini terjadi maka pelayanan penerbitan akta catatan sipil yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung melalui Simsolatera akan terhambat.